

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
(Studi Kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan  
Periode 2005-2014)**

**Hening Fitria Sarasati El Rani**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Email: [Tiaelrani@gmail.com](mailto:Tiaelrani@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Dimana Variabel Independen adalah Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk sedangkan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dengan periode pengamatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 yang dilakukan di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan meliputi 7 Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel model *fixed Effect*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan, Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-karesidenan Pekalongan.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk.

**Abstract**

*This research aims to analyzing factors influencing Local original Revenue in the Regency/City of Former Residency Pekalongan in which the independent variables are the Government Expenditure, Gross Regional Domestic Product and the Total Population. Meanwhile, the dependent variable is Local original Revenue. This research uses the secondary data from the Central Bureau of Statistics during the observation period from 2005-2014 conducted at the Regency/City of Former Residency Pekalongan covering 7 regencies and cities such as Batang Regency, Pekalongan Regency, Pekalongan City, Pemalang Regency, Tegal Regency, Tegal City, and Brebes Regency. This research uses Fixed Effect model of panel regression analysis tool.*

*The research result shows that the Government Expenditure variable has a positive and significant influence to Local original Revenue in the Regency/City of Former Residency Pekalongan. The Gross Regional Domestic Product variable has a positive and significant influence to Local original Revenue in the Regency/City of Former Residency Pekalongan. Meanwhile, the Total Population variable has no influence to Local original Revenue in the Regency/City of Former Residency Pekalongan.*

**Keyword:** *Local Original Revenue, Gross Regional Domestic Product, Government Expenditure, Total Population*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang di jalankan oleh pemerintahan Indonesia, Menjadikan adanya paradikma yang baru terhadap sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi, adanya sebuah perbedaan dimana pemerintah pusat memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk membangun daerah yang otonom dan bertanggungjawab mengatur serta mengawasi apa yang menjadi kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi serta potensi yang ada.

Dalam sistem otonomi daerah, ada tiga prinsip menurut UU No.23 Tahun 2014 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. *Desentralisasi* adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi, *Dekonsentrasi* adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/ walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Sedangkan tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat dengan pementah daerah otonom untuk melaksanakan tugas tertentu

Salah satu bentuk kewenangan yang di berikan Pemerintah secara penuh terhadap daerah otonom untuk mengelola daerahnya dalam berbagai aspek diantaranya adalah aspek keuangan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2008, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka daerah memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhannya masing masing dalam membiayai rumah tanganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ciri utama kemandirian suatu daerah dapat di lihat dari keuangan daerah dimana kemampuan daerah mengelola keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Aryanti, 2015)

Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang asli, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Sutedi, 2009).

Bentuk sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-undang No.23 tahun 2014 pasal 285 menyebutkan bahwa sumber-sumber pemerintah daerah dalam rangka meyenggarakan otonomi daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, lain-lain pendapatan yang di tetapkan oleh pemerintah. Jadi Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber dana yang di dapatkan pemerintah diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Semakin banyak kebutuhan yang dapat di biayai oleh pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin tinggi tingkat kualitas ekonomi daerah, sehingga dapat di katan mandiri dalam bidang keuangan daerah dan semakin menurun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan tahun 2012 sampai 2014:

**TABEL 1**  
**Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan tahun 2012-2014(Juta Rupiah )**

| No | Kabupaten / Kota | Tahun             |                     |                     |
|----|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|    |                  | 2012              | 2013                | 2014                |
| 1  | Kab.Batang       | 84.720,05         | 139.634,47          | 172.638,22          |
| 2  | Kab.Pekalongan   | 114.793,36        | 148.550,93          | 153.761,07          |
| 3  | Kota.Pekalongan  | 91.205,78         | 114.252,43          | 144.075,42          |
| 4  | Kab.Pemalang     | 97.951,20         | 136.362,28          | 117.133,68          |
| 5  | Kab.Tegal        | 118.741,62        | 156.244,86          | 180.429,99          |
| 6  | Kota.Tegal       | 156.663,02        | 176.377,35          | 166.143,02          |
| 7  | Kab.Brebes       | 101.806,85        | 135.055,40          | 153.413,78          |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>765.881,88</b> | <b>1.006.477,72</b> | <b>1.087.595,18</b> |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.*

Dalam tabel 1.1 menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang di terima setiap Kabupaten dan pada setiap tahunnya memiliki perbedaan kontribusi yang berbeda-beda untuk Provinsi Jawa Tengah. Dari tujuh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah administrasi Eks-Karesidenan Pekalongan pada tahun 2014 yang memiliki kontribusi terbesar Kota Tegal 180.429,99 juta rupiah kemudian di ikuti oleh Kabupaten Batang 172.638,22 Juta rupiah bila di lihat dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota tersebut pendapatan daerah setiap Kabupaten meningkat pada setiap tahunnya pada tahun 2014 jumlah Pendapatan Asli Daerah dari tujuh Kabupaten dan Kota Eks-Karesidenan Pekalongan 1.087.595,18 juta rupiah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menerapkan suatu kebijakan untuk membeli barang atau jasa, sehingga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan daerah baik secara katalisator dan fasilitator, yang membutuhkan sarana dan fasilitas pendukung termasuk anggaran belanja dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan .

Seluruh Belanja daerah merupakan bentuk dari pengeluaran pemerintah yang di keluarkan untuk kepentingan administrasi pembangunan dan bagian untuk pembangunan infrastruktur yang berguna untuk pembangunan suatu daerah. Pengeluaran Pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kegiatan ekonomi, dengan meningkatnya kegiatan akan menambah aliran penerimaan pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah yang meningkat.

Bagi suatu daerah indikator lain untuk melihat suatu keberhasilan otonomi daerah berupa pembangunan daerah yang telah di capai dan berguna untuk menentukan keputusan dimasa yang akan datang yaitu dengan cara melihat laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan meningkatnya PDRB dapat meningkatkan penerimaan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang di harapkan akan dapat meningkatkan produktifitas.

Selain Pengeluaran Pemerintah dan PDRB, Jumlah Penduduk juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan output melalui penambahan tingkat ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar

negeri (Santosa dan Rahayu, 2005). Meningkatnya Jumlah penduduk tinggi dengan diiringi perubahan teknologi akan mendorong tingkat tabungan serta peningkatan skala ekonomi.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten/Kota wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan yang terdiri dari Tujuh Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes sebagai objek penelitian karena setiap Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan memiliki berbagai macam kebudayaan dan ciri khas masing-masing mulai dari pariwisata, perdangan serta sumber daya alam yang berbeda sehingga berpotensi menghasilkan penerimaan daerah yang besar, serta dalam setiap tahunnya ada pengeluaran pemerintah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai program kerja pemerintah untuk membangun daerah otonomi sebagai bentuk pelayanan masyarakat. adanya PDRB, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Uraian diatas terkait dengan berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis merasa tertarik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah di Eks-Karesidenan Pekalongan dengan menjadikannya dalam hasil karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (studi kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2005- 2014)”**

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari di adakanya penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Menganalisis pengaruh faktor Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan
2. Menganalisis pengaruh faktor PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan
3. Menganalisis pengaruh faktor jumlah penduduk terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.

## **TIJUAN PUSTAKA**

Menurut UU No.23 tahun 2014 yang di maksud otonomi daerah adalah otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerinthaan, seperti rencana, perizinan, dan pelaksanaan, kecuali kewenangan dibidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, kebijakan moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi daerah tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas Kabupaten/kota serta kewenangan di bidang pemerinthan lainnya (Suparmoko,2000 dalam Kusri, 2015).

Adanya kemandirian pengelolaan suatu pemerintahan, daerah otonom di tuntut untuk mandiri dalam menjalankan roda perekonomian dengan baik dan dapat memenuhi segala kebutuhan belanja yang diperlukan oleh pemerintah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah, suatu daerah dikatakan sukses dalam menjalankan otonomi daerah apabila dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus bijak dalam mengelola keuangan daerah sendiri, untuk mendapatkan dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan daerah dan semakin banyaknya pembangunan daerah di harapkan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah untuk mendapatkan kesempatan kerja. Selain itu keuangan daerah satu tolak ukur suatu daerah yang sukses menjalankan otonomi daerah. Dengan demikian pemerintah daerah menggali berbagai potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah ( PAD)
  1. Pajak daerah
  2. Retribusi daerah
  3. Hasil Pengelolaan daerah yang di pisahkan dan
  4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b) pendapatan transfer
- c) lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang mengandung artian bahwa Menurut UU No23 tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.yang diterima di gunagakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, dihitung dalam ribuan rupiah per tahun. (Santoso dan Rahayu, 2005).

Menurut Mardiasmo (2002:80) Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukan suatau kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuanagan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah menurut undang-undang No.28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berurutan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah

Beriku ini yang termasuk dalam pajak daerah yaitu : (a) Pajak Hotel,( b) Pajak Restoran dan rumah makan, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak penerangan jalan. (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C, (g) Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, (h)Pajak Parkir.

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No.28 tahun 2008 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan atau badan.

Macam-macam Retribusi daerah menurut UU No.28 :

- a. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

## 3) Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, deviden dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba badan usaha milik Negara (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya (Ema, 2013).

Badan usaha yang mencakup dalam berbagai aspek baik pelayanan pemberian jasa terhadap masyarakat, pengadaan kemanfaatan umum ini memberikan sumbangan ekonomi daerah yang seluruhnya yang harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat.

## 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-Lain PAD yang sah menurut Soelarno (1990) dalam Ali chakim (2011) adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah dan buka hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas, juga buka merupakan hasil pelaksanaan kewenangan perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan. Merupakan sumber yang buka dari pajak daerah, bukan hasil retribusi daerah juga buka hasil perusahaan daerah.

## **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola pemikiran antar pemerintah daerah dengan sektor swasta, untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi dan rendahnya pendapatan riil perkapita dimana pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan riil nasional juga meningkatkan produktivitasnya (Arsyad, 1999)

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Diharapkan akan ada aktivitas ekonomi dimana faktor-faktor produksi akan diolah yang akan menghasilkan output, dan menjadikan suatu proses balasan jasa. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian pemerintah daerah menyiapkan perencanaan yang matang dalam jangka pendek maupun jangka panjang

guna memperbaiki serta dapat meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah sehingga terjadinya pembangunan daerah yang disertai dengan pertumbuhan.

Teori Harrod-domar dalam teori menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh besarnya tingkat tabungan dan investasi. Dimana jika tingkat tabungan rendah dan investasi maka pertumbuhan ekonomi akan rendah begitupula sebaliknya.

Dimana dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah dapat mengelola dari sumber daya alam yang dimiliki sehingga menambah pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi merupakan bentuk pembangunan daerah.

Teori Ekonomi klasik memandang bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Menurut Adam Smith dalam (Lincoln Arsyad, 1999) Penambahan jumlah penduduk yang tinggi diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsure penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

### **Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pendapatan Asli daerah (PAD)**

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi (Arief Eka Atmaja, 2011) dalam (Kusrini, 2015)

Peranan pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dalam menyediakan barang publik menunjang kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial sehingga adanya kenaikan produktifitas yang meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah menetapkan pajak dan retribusi dimana akan menambah PAD.

### **Hubungan PDRB dengan Pendapatan Asli daerah**

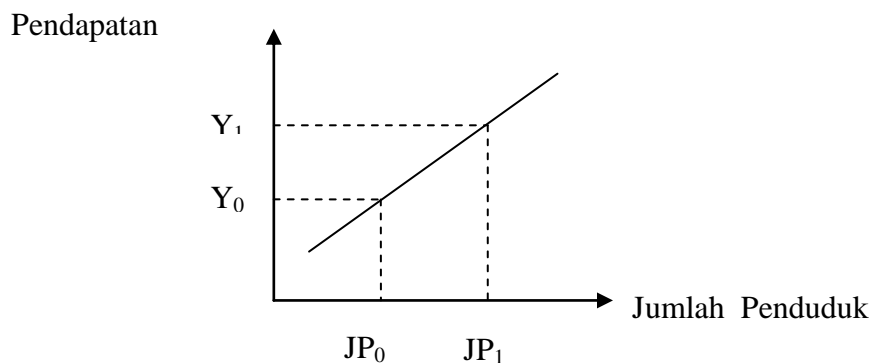
Hubungan yang jelas antara PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan hubungan fungsional karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatkan PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktifitasnya. Santoso dan Rahayu (2005).

PDRB merupakan faktor PAD dengan meningkatkan PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Dengan demikian akan adanya penambahan penerimaan pemerintah yang akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang nantinya akan meningkatkan produktifitas masyarakat. Dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya (Ema, 2013).

## Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli daerah

Menurut Adam Smith (lincolin Arsyad, 1999) Penambahan jumlah penduduk yang tinggi di iringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang di butuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsure penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Besarnya pendapatan dapat di pengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat di tarik juga akan meningkat.



Sumber : Sadono Sukirno, 2004 dalam Kusri,2015

### Gambar 1

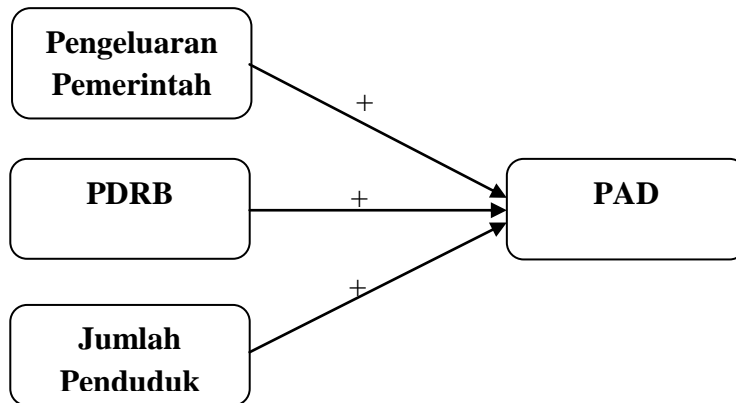
#### Kurva Hubungan Antara Jumlah Penduduk dan Pendapatan

Gambar 2.3 Menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima oleh karena itu akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, dan akan di ikuti oleh peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan dan pendirian usaha baru pada sektor produksi. Pendirian sektor usaha baru akan meningkatkan angkatan kerja atau membuka peluang terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga jika banyak masyarakat yang bekerja maka pendapatan akan meningkat dan cenderung akan meningkatkan pendapatan daerah juga. jumlah penduduk dari  $JP_0$  menjadi  $JP_1$  menyebabkan pendapatan naik dari  $Y_0$  menjadi  $Y_1$  karena  $Y = C$  (Adi Hartyanto, 2014)

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu maka peneliti menyusun kerangka pemikiran yang menjadi sebuah dasar hubungan antar variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan independen yaitu pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk yang di gambarkan dalam gambar 2





**Gambar 2**  
Skema Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Variabel yang Mempengaruhinya

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang di dapat dari buku-buku atau literature pada instansi atau lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data-data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah , meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), pengeluaran pemerintah, PDRB dan Jumlah penduduk. Data berupa *time series* dari tahun 2005-2014 dan *cross section* dari 7 Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Pekalongan.

### Defisi Opresional

#### 1. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah tahun 2005-2014, dalam satuan juta rupiah pertahun.

#### 2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah adalah semua jumlah belanja daerah dan pembiayaan daerah yang di keluarkan oleh pemerintah daerah dalam setiap tahun anggaran 2005-2014, dalam satuan juta rupiah.

#### 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PRB adalah Produksi barang-brang dan jasa-jasa di produksi diwilayah Eks-Karesidenan Pekalongan. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan dengan menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar dari tahun 2005-2014, dalam satuan juta rupiah.

#### 4. Jumlah Penduduk

Jumlah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Jumlah penduduk dari tahun 2005-2014

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah model analisis regresi panel data. Data panel merupakan gabungan antara data berkala (*time series*) dan data individual (*cross section*). Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya yaitu, *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Fixed Effect Model*.

Adapun model regresi data panel sebagai berikut :

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PP_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 JP_{it} + e_t$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PP : Pengeluaran Pemerintah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

JP : Jumlah Penduduk

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1, \dots, \beta_3$  : Koefisien regresi

e : *error*

i : Kabupaten/Kota

t : Tahun

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini pengujian multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan *correlation matrix*, jika hasilnya ada yang melebihi dari 0,8 maka itu menandakan bahwa terjadi multikolinieritas.

**Tabel 2 :Hasil Uji Multikolinieritas**

|            | LOG(PAD) | LOG(PP)  | LOG(PDRB) | JP        |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|
| LOG(PAD)   | 1.000000 | 0.711652 | 0.473324  | 0.062423  |
| LOG(PP)    | 0.711652 | 1.000000 | 0.727355  | 0.001538  |
| LOG (PDRB) | 0.473324 | 0.727355 | 1.000000  | -0.042397 |
| JP         | 0.062423 | 0.001538 | -0.042397 | 1.000000  |

Sumber : Hasil pengolahan data panel menggunakan program *Eviews7*.

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Park

**Tabel 3 :Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Variabel  | Prob.         |
|-----------|---------------|
| C         | <b>0.6205</b> |
| LOG(PP)   | <b>0.4238</b> |
| LOG(PDRB) | <b>0.6227</b> |
| JP        | <b>0.7437</b> |

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

## B. Analisis Model Terbaik

### 1. Uji Chow

Uji chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect*.

**Tabel 4 :Hasil Uji Chow**

| Effects Test    | Statistic | d.f.   | Prob.  |
|-----------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F | 68.192342 | (6,60) | 0.0000 |

Berdasarkan uji Chow diatas, kedua nilai probabilitas *Cross Section F* sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga menolak  $h_0$ . Jadi berdasarkan uji Chow, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Fixed effect*.

### 2. Uji Husman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan metode antara *random effect* dengan *fixed effect*.

**Tabel 5 : Hasil Uji Husman**

| Test Summary         | Chi-sq.statistic | Chi-sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 117.645833       | 3            | 0.0000 |

Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas *Cross-section random* adalah 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak. Jadi menurut uji Hausman, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Fixed effect*.

## C. Hasil Regresi

**Tabel 6: Hasil Estimasi *Common effect*, *Random Effect*, dan *Fixed effect*.**

| Pendapatan Asli Daerah | Model                     |                           |                           |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | <i>Common Effect</i>      | <i>Fixed Effect</i>       | <i>Random Effect</i>      |
| Konstanta              | 2.397491                  | -36.44540                 | -9.7985790                |
| Log(PP)                | 0.780347***<br>(0.126748) | 0.219570**<br>(0.083826)  | 0.648682***<br>(0.060898) |
| Log(PDRB)              | 0.049515*<br>(0.105469)   | 2.769295***<br>(0.272276) | 0.758012***<br>(0.152485) |
| Jumlah Penduduk        | 0.017685*<br>(0.024257)   | 0.009983<br>(0.3019)      | 0.025941<br>(0.010229)**  |
| R2                     | 0.491810                  | 0.928616                  | 0.700855                  |
| Fstatistik             | 23.25864                  | 100.7360                  | 54.88580                  |
| Probabilitas           | 0.000000                  | 0.000000                  | 0.000000                  |

Keterangan: ( ) : Standar Error \*\*\*Signifikan di tingkat 1% , \*\* signifikan 5% dan \* signifikan 10%

Berdasarkan uji analisis model yang telah dilakukan menggunakan uji *Chow* dan *Hausman test* keduanya menyarankan untuk menggunakan *fixed effect model*.

#### D. Hasil Estimasi data Panel

Tabel 7 : Hasil Estimasi *fixed effect*

| Variabeln Dependen :Pendaptan asli Daerah | Model        |
|---|--------------|
|   | Fixed Effect |
| <b>Konstanta</b>                          | -36.44540    |
| Standar error                             | 3.433866     |
| T-statistik                               | -10.62352    |
| Probabilitas                              | 0.0000       |
| <b>Pengeluaran Pemerintah</b>             | 0.219570     |
| Standar error                             | 0.083826     |
| T-statistik                               | 2.619363     |
| Probabilitas                              | 0.0111       |
| <b>PDRB</b>                               | 2.769295     |
| Standar error                             | 0.272276     |
| T-statistik                               | 10.17090     |
| Probabilitas                              | 0.0000       |
| <b>Jumlah Penduduk</b>                    | 0.009983     |
| Standar error                             | 0.009587     |
| T-statistik                               | 1.041300     |
| Probabilitas                              | 0.3019       |
| <b>R<sup>2</sup></b>                      | 0.928618     |
| <b>F-Statistik</b>                        | 100.7360     |
| <b>Prob(F-statistik)</b>                  | 0.000000     |
| <b>DurbinWatson stat</b>                  | 1.013027     |

Dari hasil regresi pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan

$$\text{Log (PAD)}it = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{PP})it + \beta_2 \log(\text{PDRB})it + \beta_3 \text{JP}it + \varepsilon t$$

$$\text{Log PAD} = -36.44540 + 0.219567\log(\text{PP})it + 2.769295\log(\text{PDRB})it + 0.00993 \text{JP}it$$

Dimana :

Log(PAD) = Pendapatan Asli Daerah

Log(PP) = Pengeluaran Pemerinta

Log(PDRB) = Produk domestic Regional Bruto

JP = Investasi Industri

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien Parameter

I = Kabupaten/Kota

t = Periode waktu

$\varepsilon t$  = *error term*

#### E. Uji Statistik

##### 1. Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Dari hasil pengujian data Pengeluaran Pemerintah, produk domestik regional bruto (PDRB), dan jumlah penduduk terhadap Pendaptan asli daerah (PAD) di Kabupeten/Kota Eks-Karisedenan Pekalongan periode 2005-2014 diperoleh dari nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,92. Dengan demikian menunjukkan secara statistik 92 persen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk. Sedangkan 8 persen dari tersebut penerimaan pendaptan asli daerah di pengaruhi oleh Variabel yang lain.

## 2. Uji Statistik F

Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan menunjukkan Hasil regresi menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pendapatan hasil dari nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000000 dimana signifikan  $\alpha = 1\%$  artinya variabel-variabel independen (pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah penduduk) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (PAD).

## 3. Uji Statistik

Uji T bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 8: Hasil Uji t- statistik**

| Variabel               | Koefisien Regresi | Prob.  |
|------------------------|-------------------|--------|
| Pengeluaran Pemerintah | 0.219570          | 0.0111 |
| PDRB                   | 2.769295          | 0.0000 |
| Jumlah penduduk        | 0.009983          | 0.3019 |

Bersarkan Tabel di atas variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki probabilitas sebesar 0,0111 signifikan pada  $\alpha = 5\%$  maka variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Pengeluaran pemerintah mempunyai koefisien sebesar 0.219570 yang artinya apabila ada kenaikan dari variabel pengeluaran pemerintah 1 persen akan meningkatkan PAD sebesar 0.219570 persen. Selanjutnya variabel PDRB memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 signifikan di  $\alpha = 1\%$  dengan demikian variabel produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. nilai koefisien regresi untuk variabel produk domestik regional bruto sebesar 2.769295 dengan artian jika ada kenaikan variabel Produk domestik regional bruto sebesar 1 persen akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.76 persen. variabel Jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3019  $> 5\%$  dengan artian jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD. memiliki koefisien sebesar 0.009983 dengan artian apabila adanya kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.009983.

## F. Pembahasan

### a) Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan

Nilai Koefisien Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di karesidenan Eks-Karesidenan Pekalongan sebesar 0.219570 dengan nilai probabilitas 0.0111. ini berarti bila ada kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 1% maka akan diikuti dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.219570 atau sebesar 0,21% hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Postif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah Eks-Karesidenan Pekalongan.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan perkapita meningkat, secara relative meningkatkan pengeluaran, Didukung dengan teori dari Peacock dan Wiseman bahwa pemerintah memiliki peran sebagai katalisator dan fasilitator sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk melaksanakan pembangunan. Anggaran yang dikeluarkan tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan

maupun kegiatan pembangunan. Semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan maka akan mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila kegiatan ekonomi masyarakat meningkat maka akan meningkatkan pula aliran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini di dukung (santoso dan rahayu, 2005) Dalam Jurnal “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam Pelaksanaan Otonomi daerah “menerangkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam membeli barang ataupun jasa yang digunakan untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendukung. dimana belanja-belanja tersebut dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Ini dipertegas (Datuk Indra, 2012) Peningkatan Pengeluaran Pemerintah mempunyai efek multiplier terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi daerah melalui Pembangunan sekolah, sarana kesehatan dan sarana infrastruktur, sehingga pengeluaran pemerintah akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan adanya Pengeluaran pemerintah yang di gunakan untuk membangun Fasilitas, maka masyarakat dapat menggunakannya dan merasa aman dan nyaman sehingga menimbulkan meningkatkan produktivitas Masyarakat dan Investor di daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dengan demikian pemerintah menetapkan pajak, serta retribusi yang mengalir menambah Pendapatan asli daerah.

Dengan demikian Hipotesis “Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota Di Eks-Karesidenan Pekalongan” Dapat di terima.

b) Produk Domestik Regional Bruto (PADRB) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan

Nilai Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/ Kota di karesidenan Eks-Karesidenan Pekalongan sebesar 2.769295 dengan nilai probabilitas 0.0000 signifikan. Ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu juga berarti bila ada kenaikan Produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 1 persen maka akan diikuti dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.769295 atau sebesar 2.76 persen, ini menunjukkan bahwa adanya Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah Merupakan Hubungan yang fungsional karena PDRB merupakan Fungsi Dari PAD. Meningkatnya PDRB maka Menambah Penerimaan Pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai macam program pembangunan, selanjutnya akan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga di diharapkan masyarakat dapat meningkatkan produktifitasnya (Santoso dan Rahayu :2005).

Peralihan sektor perekonomian dari pertanian ke sektor industri pengolahan yang ada di beberapa Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan mulai dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu: Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, dan Brebes. Pada tahun 2010 Sektor industri menyumbangkan 10-15 persen dalam PDRB dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tahun 2014 sektor industri pengolahan menyumbangkan 25-30 persen terhadap PDRB.

Adanya Kenaikan di bidang Industri pengolahan Pada beberapa Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan, ini menggambarkan Adanya peningkatan pendapatan seseorang yang menjadikan kemampuan membayar pajak menjadi meningkat dan menabuh penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ema Yuliana Florentina dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat”, Datuk, Indra 2012 “Analisi Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Makasar” dan Dyah Kusri 2015 “Pengaruh Belanja Langsung, Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah Penduduk” yang menyatakan bahwa PDRB mempunyai berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.

Dengan Demikian Hipotesis yang Berbunyi tentang “Diduga Produk Dometik Regional Bruto Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan” Dapat diterima.

c) Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan

Nilai Koefisien Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di karisienan Eks-Karesidenan Pekalongan dengan nilai koefisien sebesar 0.009983 dengan nilai probabilitas 0.3019 ini. Dimana nilai signifikansi  $0.3019 > 0.05$ , ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pemalang. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang mempunyai hasil bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian dari “Adi Haryanto (2014) dalam penelitian yang berjudul “Studi tentang Pertumbuhan Ekonomi ,Belanja Langsung Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan asli Daerah pada satu wilayah penggabungan Wilayah Gerbangkertosusilo”, penelitian oleh Diyah Kusri(2015), Yustina Febriani (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk belum berpengaruh dengan pendapatan asli daerah.

Menurut Adi Haryanto Ada beberapa indikator yang menyebabkan jumlah penduduk tidak berpengaruh dengan pendapatan asli daerah adalah komposisi jumlah penduduk usia tidak produktif hampir sama dengan penduduk pada usia produktif yang bekerja. Usia produktif dalam konteks ini yaitu penduduk dengan usia kerja di bawah 15 tahun dan penduduk dengan kategori bukan angkatan kerja yang terdiri dari iburumah tangga, orang cacat, anak sekolah maha siswa serta pengangguran.

Jumlah penduduk belum berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan. Salah satu Penyebabnya adalah jumlah peduduk Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan sebesar 6.620.419 juta jiwa dengan presentasi 50.36 persen bekerja di sektor pertanian, sektor industri perdagangan dan masing-masing sebesar 29.76 persen 19,70 persen jumlah penduduk yang masih tergantung pada sektor pertania atau banyaknya jumlah penduduk yang mata pencaharian yang utama bertani, dimana sektor pertania mempunyai sumangsih yang kecil terhap PAD.

Kondisi Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan sedang mengalami peralihan sektor pertanian ke sektor industri yang terjadi sejak tahun 2010, dalam peralihan stuktur perekonomian dari pertanian ada beberapa masyakat yang tidak dapat masuk bekerja di sektor industri karena keahlian yang berbeda, dimana sektor pertania masih tradisoal, berbeda dengan industri harus

mempunyai keahlian tertentu untuk dapat bekerja didalamnya, perubahan struktur ekonomi menjadikan atau terciptanya Pengangguran.

Penelitian ini selanjutnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustina Febriani dengan judul penelitian berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah di Kabupaten-Kabupaten Eks Karesidenan Pati. Menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana walaupun angka jumlah penduduk yang bekerja meningkat namun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat maka tidak dapat dipungkiri bahwa angka pengangguran juga akan meningkat.

Walaupun dalam penelitian ini belum dapat dibuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Dalam waktu yang akan datang jumlah penduduk yang mempunyai skill dan berpendidikan mampu menjadi Sumber daya Manusia yang bermutu tinggi sehingga dapat menciptakan output yang baik.

Dengan ini hipotesis bahwa "Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan" belum terbukti dalam penelitian ini.

## **KESIMPULAN , SARAN DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil regresi data panel mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Maka dapat dilihat hasil kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan walaupun belum berpengaruh sekarang namun jumlah penduduk yang produktif akan berpengaruh positif terhadap perekonomian.

### **Saran**

1. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan belanja daerah khususnya belanja pembangunan. Karena dengan adanya infrastruktur akan mendukung perekonomian, serta menyediakan sarana prasarana berupa infrastruktur jalan yang halus serta transportasi umum yang nyaman dan lebih baik. Agar jalannya pendistribusian barang lebih baik ini dapat meningkatkan produktivitas.
2. Pemerintah meningkatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik agar tercipta generasi sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan kemajuan zaman, dimana di era globalisasi seperti ini pendidikan merupakan suatu hal yang penting menjadikan masyarakat lebih cerdas dan siap untuk bersaing. Selain itu menekan jumlah penduduk dengan program KB sehingga tidak terjadi kepadatan penduduk.
3. Meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan dengan lebih meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya objek-objek yang dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.



## Keterbatasan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah masih di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu : pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk, sedangkan masih banyak variabel yang lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Dapat di katakan penelitian Ini hanya lingkup Eks-Karesidenan Pekalongan dimana hanya ada 7 Kabupaten/ Kota , bisa di katakan objek yang di jangkau kurang luas, sehingga saran untuk peneliti selanjutnya dapat menambah objek menjadi wilayah Provinsi.
3. Periode waktu yang di gunakan dalam penelitian ini hanya 10 tahun dari 2005-2014 ini di karenakan adanya keterbatasan dalam mengakses data.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus, widarjono.1999. “Penduduk dan Pertumbuhah Ekonomi di Indonesia : analisis kasus kausalitas”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol 4 No.2 tahun 1999.

Ahmad,J.S.2016. “Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus24 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2014)”. *Skripsi Ilmu Ekonomi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi pertama*. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik , 2014, *Jawa Tengah dalam angka 200 -2014*, Provinsi Jawa Tengah  
\_\_\_\_\_,2014, *Kabupaten Batang dalam angka 2005-2014*, Kabupaten Batang  
\_\_\_\_\_,2014, *Kabupaten Pekalongan dalam angka 2005 -2014*, Kabupaten  
Pekalongan

\_\_\_\_\_,2014, *Kota Pekalongan dalam angka 2005-2014*, Kota Pekalongan  
\_\_\_\_\_,2014, *Kabupaten Pemalang dalam angka 2005 -2014*, Kabupaten  
Pemalang

\_\_\_\_\_, 2014, *Kabupaten Tegal dalam angka 2005 -2014*, KabupatenTegal

\_\_\_\_\_, 2014, *Kota Tegal dalam angka 2005 -2014*, Kota Tegal

\_\_\_\_\_, 2014, *Kabupaten Batang dalam angka 2005 -2014*, Kabupaten Batang

Basuki, A. T., danYuliadi, I. 2014. *Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*. Danisa Media. Yogyakarta.

Chakim, Ali. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. Tesis Program pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas sebelas Maret. Surakarta

Datu K, Indra. Rindu. 2012. “Analisis yang memepengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Makasar tahun 1999 -2009”. *Skripsi Ilmu ekonomi*, Universitas Hasanussin. Makasar.

Ema, Yuliana.F. 2013. "Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1995-2010". *Skripsi*. Program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya. Yogyakarta.

Febriani, Yustina., 2016 "Analisis Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (studi kasus Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati)". *Skripsi Ilmu Ekonomi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta

Lumban, Pahala Bellarminus. 2015. "Anilisis Pengaruh Jumlah Pekerja, Pengeluaran Pemerintah, dan Produk Dometik Regional Bruto Terhadap Pendaptan asli daerah Tahun 1999-2013 (studi pada Malang Raya)". *Jurnal*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.

Hartyanto, Adi. 2014. "Studi Tentang Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. Universitas Brawijaya. Malang.

Haksari, Dewi Sri. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendaptan Asli daerah (PAD) di Kabupateh Klaten tahun 1989-2011". *Skripsi*. Program studi Ekonomi Pembangunan Fakultaas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta

Hudiyanto, 2013, *Ekonomi Pembangunan*, Pusat Pengembangan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jolianis., 2012, "Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapat anasli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat", *Jurnal Ekonomica Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatra Barat*, Vol. 1 No. 1, Oktober, hal 43-65.

Kusrini. Diyah 2015."Anlisis Pengaruh belanja langsung, Produk domestic regional Bruto dan jumlah peduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah". *skripsi ilmu ekonomi*. Universitas Muhammmadyah Yogyakarta

Kusuma., Aryanti., 2015 "Faktor- Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah di kabupaten Pati. *sekripsi Ekonomi dan bisis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Muhtar, Aryanti. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Pati tahun 1993- 2013". *Skripsi*. Program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Pratiwi, Eko IIN. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah( PAD ) di Kabupaten Sragen tahun 1991- 2003". *Skripsi*. Program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Prawoto, N., dkk. 2012. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsidan Publikasi Karya Ilmiah*. UPFE UMY. Yogyakarta.

Purwaningsih, Esti. 2011. "Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen tahun 1991- 2008". *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ruswandi, Rahamawati Rina. 2009. "Analisi Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Sari, Erni Purnama. 2011. "Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gersik". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional.

Santosa, Purbayu Budi., dan Rahayu, Retno Puji. 2005. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor –Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri ", *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol.2 No1/lull 2005 :9 -18.

Sukirno, Sadono., 2011, *Makroekonomi Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.

Susanto, Iwan. 2014. "Analisis PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya. Malang

Sutedi, Andrian. 2009. *Implikasi Hukum Sumber Pembiayaan Daerah: dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta. Sinar Grafika

\_\_\_\_\_,1999. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

\_\_\_\_\_.2004. Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

\_\_\_\_\_.2004 Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_.2006 Undang–undang Nomor 13 tahun 2006 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

\_\_\_\_\_.2014. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Waluyo.Wirawan B.Ilyas.2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta .Salaemba Empat